IMPLEMENTASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL BAGI PENDUDUK WAJIB KTP-EL DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jordan Dwiputra Junaidi
NPP. 33. 0646
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: joorangbaik@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Indramayu, S.H., M.H
Email: indram@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The activation of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) in Mataram City continues to face a low activation rate. This condition is influenced by budget limitations, internet network constraints, low public understanding of IKD, limited utilization of IKD, and the suboptimal capacity of human resources involved in the activation process. Meanwhile, the Directorate General of Population and Civil Registration established a national IKD activation target of 30% in 2023.* ***Purpose:*** *This study aims to examine the implementation of IKD activation for residents who are required to possess an electronic identity card (KTP-el) in Mataram City, West Nusa Tenggara Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with an inductive approach and utilized the policy implementation theory of George C. Edwards III as presented by Leo Agustino (2022:154–158).* ***Results:*** *This study applied George C. Edwards III's theory, which consists of four dimensions and eleven indicators. The findings revealed that two indicators had not been implemented optimally, namely the limited availability of budget resources and the inadequate quantity of human resources involved in the IKD activation process. Furthermore, the implementation of IKD activation in Mataram City has not yet achieved optimal results. As of July 2025, the IKD activation rate in Mataram City had only reached 4.12% of the national target of 30%, indicating that the implementation of IKD activation remained below expectations.****Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of IKD activation in Mataram City has been carried out relatively well, although it has not yet achieved optimal outcomes. Therefore, it is recommended to strengthen IKD regulations at the statutory level, enhance cooperation with other institutions, and establish a dedicated IKD task force to accelerate the activation process.*

Keywords: *Digital Population Identity (IKD), IKD Activation, Mataram City, Policy Implementation, Public Service.*

ABSTRAK

Permasalahan: Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mataram masih menghadapi rendahnya capaian aktivasi IKD, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kendala jaringan internet, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap IKD, terbatasnya pemanfaatan IKD, serta belum optimalnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan aktivasi IKD sementara itu Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan capaian target nasional untuk aktivasi IKD sebesar 30% pada tahun 2023 **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teori

implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Leo Agustino(2022:154-158). **Hasil/Temuan:** Penulisan ini menggunakan teori George C. Edward III yang di dalamnya terdapat 4 dimensi dan 11 indikator, ditemukan 2 indikator yang belum optimal yakni ketersediaan anggaran yang masih terbatas serta belum optimalnya kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram belum maksimal, pada Juli 2025, capaian aktivasi IKD di Kota Mataram baru mencapai 4,12% dari target nasional sebesar 30%, sehingga pelaksanaan aktivasi IKD dinilai masih belum optimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram telah berjalan cukup baik. Adaupun saran dari penelitian ini yaitu memperkuat regulasi IKD selevel undang-undang, meningkatkan kerja sama dengan Instansi lain dan membentuk tim khusus IKD.
Kata kunci: aktivasi IKD, Identitas kependudukan digital (IKD), Implementasi Kebijakan, Kota Mataram, Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dibentuk dengan tujuan menjaga kehidupan masyarakat agar dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Menurut Ndaraha (2000) dalam Labolo (2016;37) menjelaskan pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer berupa pemerintah sebagai media dalam menyediakan jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk layanan sipil dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah sebagai provider atau penyedia kebutuhan akan masyarakat yang tidak dapat diperoleh sendiri dikarenakan keadaan yang masih lemah dan tak berdaya termasuk pengadaan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana. (Labolo, 2016)

Perkembangan teknologi merupakan proses perubahan dan penyempurnaan berbagai perangkat, sistem, dan metode yang digunakan manusia untuk mempermudah aktivitas kehidupan. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sistem yang bersifat konvensional menuju sistem yang berbasis elektronik dan digital. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk mengelola data, informasi, serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien. (Gatiningsih, 2018)

Sebelum tahun 2009 mekanisme administrasi kependudukan (adminduk) terdapat berbagai permasalahan seperti data yang kacau atau tidak tersistematis serta data kependudukan ganda. Kondisi tersebut terjadi disebabkan karena proses penerbitan KTP melalui Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) di tingkat kabupaten/kota yang mana database dikelola oleh setiap daerah menyebabkan terjadinya *margin of error*. Ketika data terjadi hal seperti ini perlu dilakukan konsolidasi atau data ditunggalkan ke sistem pusat untuk mendapatkan data penduduk serta adanya kebijakan antar instansi yang sering bertabrakan sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya identitas ganda. (Hutasoit, 2017)

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia telah mendorong agenda digitalisasi birokrasi sebagai bagian dari reformasi struktural yang menyeluruh. Salah satu wujud konkret dari transformasi ini adalah peluncuran IKD oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari penguatan identitas tunggal nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta mendukung integrasi layanan pemerintah dan swasta dalam satu ekosistem digital.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini di latarbelakangi oleh rendahnya capaian aktivasi IKD di Kota Mataram yang masih jauh dari target nasional yakni sebanyak 100.845 jiwa apabila dirubah menjadi persen maka sebesar 4.12 % per Juli 2025. Target nasional Kota Mataram yang harus dicapai sebesar 30% yakni sebanyak 336. 151 jiwa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD di Kota Mataram.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian merupakan alasan mendasar yang menjelaskan mengapa suatu penelitian perlu dilakukan. Urgensi menunjukkan adanya permasalahan, kesenjangan pengetahuan (*research gap*), atau kebutuhan praktis yang memerlukan solusi melalui kegiatan penelitian. Keberadaan urgensi penelitian sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan relevansi, kontribusi, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. (Karl & Linus, 2023)

Penelitian ini penting dilakukan guna mengevaluasi secara kritis proses implementasi kebijakan IKD di Kota Mataram, termasuk strategi, metode, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. penelitian ini akan menggali upaya-upaya yang dilakukan Dinas Dukcapil Kota Mataram dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam implementasi IKD di Kota Mataram. Harapan penulis pada penelitian yang akan dilakukan yaitu dapat meningkatkan capaian aktivasi IKD di Kota Mataram

1.4 Pelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang berjudul *Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia* dengan metode Kualitatif dengan analisis kebijakan hasil/temuan implementasi IKD mendukung transformasi digital pelayanan publik dan integrasi data kependudukan. Namun, tingkat adopsi IKD masih rendah karena masyarakat masih lebih banyak menggunakan KTP-el fisik dibandingkan IKD. Faktor literasi digital dan kesiapan ekosistem layanan menjadi tantangan utama.(Zainudin, 2025) Penelitian yang kedua dengan judul *Community E-Readiness in Adopting Technology: Evaluation of the Implementation of Digital Population Identity Application in Ternate City, Indonesia* dengan metode Kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan FGD, hasil/temuan Keberhasilan implementasi IKD dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengadopsi teknologi. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan digital, strategi pelayanan, dan layanan jemput bola mampu meningkatkan penggunaan IKD, tetapi literasi digital masyarakat masih menjadi kendala. (Kupurunda et al., 2025) Penelitian yang ketiga dengan judul *A Policy Implementation Model for Population Administration Digitalization: Lessons from the Implementation of Digital Identity* dengan metode studi kasus kualitatif, hasil/temuan Implementasi IKD dipengaruhi oleh kepemimpinan digital, kapasitas organisasi, komunikasi kebijakan, dan inklusi digital masyarakat. Hambatan utama berasal dari keterbatasan pemahaman masyarakat, infrastruktur digital, dan kesenjangan akses teknologi.(Susilawati et al., 2026) Penelitian yang keempat dengan judul *Toward Digital Population Administration: A Qualitative Analysis of the Implementation of Digital Identity Policies in the Transformation of Population Services* dengan metode Kualitatif studi kasus, Hasil/temuan IKD dipandang sebagai simbol modernisasi pelayanan administrasi kependudukan. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam menjelaskan prosedur, mendampingi masyarakat, dan membangun kepercayaan terhadap keamanan data digital. (Fika et al., 2026) Penelitian kelima dengan judul *Effectiveness of Implementation of Digital Population Identity (IKD) Innovation in KTP-el Services at the*

Tasikmalaya City Population and Civil Registration Office dengan metode kualitatif evaluatif, hasil/temuan IKD meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Akan tetapi, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi digital.(Rahmah et al., 2026)

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan dengan peneliti yang akan dilaksanakan ialah penelitian yang akan dilaksanakan menitikberatkan pada capaian aktivasi IKD dan menggali upaya untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD serta akan berfokus pada kelompok penduduk wajib KTP-el. Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori yang berbeda yakni teori implementasi George C. Edward III. Perbedaan juga terletak pada lokus penelitian yakni penelitian yang akan dilaksanakan berlokasi di Mataram.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD di Kota Mataram dalam mencapai target nasional.

II METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah. Penelitian menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan. Meskipun penelitian bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran, penelitian dianggap usaha yang paling efektif untuk menemukan sesuatu yang baru bagi manusia Penelitian dianggap usaha yang paling efektif untuk menemukan sesuatu yang baru bagi manusia. (Nurdin, 2019) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga penelitian ini mencoba untuk memfotret fenomena aktivasi IKD yang terjadi di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III dengan 4 dimensi yakni komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. (Agustino, 2020) Penentuan informan menggunakan dua teknik *sampling* yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*.(Sugiyono, 2023) Jumlah informan sebanyak 10 yakni pengambil kebijakan Disdukcapil Kota Mataram, pelaksana kebijakan Disdukcapil Kota Mataram. Informan ini diperoleh melalui *Purposive Sampling* dan masyarakat yang merasakan dari kebijakan, untuk masyarakat sebagai informan ditetapkan dengan *Snowball Sampling.*

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri karena ketidakjelasan berbagai hal dalam penelitian. Setelah penelitian memiliki fokus yang sudah jelas dapat dikembangkan instrumen penelitian yang dapat melengkapi dan membandingkan data yang ada dengan cara wawancara dan observasi. (Samsu, 2017)

Tekink pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi partisipasi aktif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi serta triangulasi (Medica et al., 2020) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo. NVivo adalah perangkat lunak analisis data kualitatif yang digunakan peneliti untuk mengorganisasi, mengkode, dan menganalisis data non-numerik secara sistematis. (Ariesto, 2021)

Peneliti menetapkan rancangan jadwal penelitian berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh IPDN Tahun Akademik 2025-2026 bagi Satuan Praja Utama yakni pada

Januari 2026 dan Lokasi Penelitian akan mengambil sampel dilakukan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melakukan penelitian dan memperoleh beberapa data terkait aktivasi IKD di Kota Mataram yang dikorelasikan dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. dalam Agustino (2022: 154-158) yang kemudian implementasi dibagi kedalam 4 dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimensi komunikasi dalam implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram telah berjalan cukup baik dan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan program. Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi diukur melalui tiga indikator, yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Pada indikator transmisi, Disdukcapil Kota Mataram telah melakukan penyampaian informasi melalui berbagai media, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan jemput bola, media sosial Instagram, serta layanan aktivasi IKD secara daring menggunakan aplikasi Discord. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Administrator Database yakni “Kami sudah sering melakukan sosialisasi terhadap OPD-OPD yang ada di Kota Mataram dan juga kecamatan. Selain itu, kami juga melakukan aktivasi IKD secara online menggunakan aplikasi Discord. Mengapa menggunakan Discord, karena tidak memerlukan biaya dan juga tidak ada batas waktu dalam melakukan komunikasi, tidak seperti Google Meet maupun Zoom sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat diminimalisir.” dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa berbagai saluran komunikasi tersebut dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan capaian aktivasi IKD. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi berupa akun Instagram @dukcapil_mataram yang aktif menyebarluaskan informasi IKD serta penggunaan Discord sebagai inovasi pelayanan aktivasi secara online.

Pada indikator kejelasan informasi, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat IKD telah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kejelasan informasi juga didukung oleh keberadaan media informasi seperti spanduk, banner, dan petunjuk layanan yang menjelaskan tahapan aktivasi IKD secara rinci. Hasil observasi menunjukkan bahwa petugas pelayanan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat dengan sikap yang antusias dan disiplin sehingga memudahkan masyarakat memahami proses aktivasi IKD. Sementara itu, pada indikator konsistensi informasi, hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menunjukkan bahwa seluruh pegawai Disdukcapil memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur aktivasi IKD karena telah memperoleh pelatihan dan pembekalan terkait layanan tersebut. Hasil observasi juga menemukan adanya standar informasi berupa spanduk tata cara aktivasi IKD yang digunakan sebagai pedoman dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Meskipun frekuensi sosialisasi belum memiliki jadwal yang tetap dan masih menyesuaikan anggaran serta kebutuhan, informasi yang disampaikan relatif seragam sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan pemahaman di masyarakat.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram telah terlaksana dengan cukup baik melalui penyampaian informasi yang beragam, jelas, dan relatif konsisten. Namun demikian, optimalisasi sosialisasi yang lebih terjadwal dan berkelanjutan masih diperlukan

agar informasi mengenai IKD dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung peningkatan capaian aktivasi IKD di Kota Mataram.

3.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimensi sumber daya dalam implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram terdiri atas tiga indikator, yaitu sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan ketersediaan anggaran. Secara umum, sumber daya yang dimiliki Disdukcapil Kota Mataram telah mendukung pelaksanaan aktivasi IKD, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan implementasi program belum berjalan secara optimal.

Indikator sumber daya manusia, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Mataram memiliki 83 pegawai dengan komposisi pendidikan yang didominasi oleh lulusan sarjana. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menunjukkan bahwa seluruh pegawai pada dasarnya telah memahami prosedur aktivasi IKD dan mampu melaksanakan pelayanan aktivasi IKD. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan penggunaan pegawai tertentu secara berulang dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kegiatan aktivasi lebih sering ditangani oleh petugas yang sama, meskipun pegawai lain memiliki kemampuan yang setara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas sumber daya manusia telah memadai, tetapi pemanfaatannya belum dilakukan secara merata sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja.

Indikator ketersediaan fasilitas, hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Mataram telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan aktivasi IKD. Fasilitas tersebut meliputi komputer pelayanan, laptop, mobil layanan keliling, speaker informasi, dan kamera yang digunakan dalam pelayanan di kantor maupun kegiatan jemput bola. Hasil observasi memperlihatkan bahwa fasilitas tersebut berfungsi dengan baik dan digunakan dalam kegiatan pelayanan serta sosialisasi aktivasi IKD kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan fasilitas yang memadai, proses aktivasi IKD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Indikator ketersediaan anggaran, hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas menunjukkan bahwa pembiayaan aktivasi IKD berasal dari APBD dan APBN yang dialokasikan melalui bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk program aktivasi IKD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek anggaran masih menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram. Keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan pendukung seperti sosialisasi, peningkatan kapasitas petugas, dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa dimensi sumber daya dalam implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram telah cukup mendukung pelaksanaan program, terutama dari aspek sumber daya manusia dan fasilitas. Namun, masih terdapat dua indikator yang belum optimal, yaitu kuantitas sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara merata serta ketersediaan anggaran yang belum dialokasikan secara khusus untuk program aktivasi IKD. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan SDM dan penyediaan anggaran yang lebih spesifik diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram

3.3 Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimensi disposisi dalam implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mataram menunjukkan kondisi yang cukup baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Dimensi disposisi dianalisis melalui tiga indikator, yaitu komitmen dan dedikasi pelaksana, insentif bagi pelaksana, serta pengaturan birokrasi pelaksana.

Indikator komitmen dan dedikasi pelaksana, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa petugas Disdukcapil Kota Mataram bersikap antusias, ramah, dan terbuka dalam memberikan pelayanan serta menjelaskan informasi terkait aktivasi IKD. Masyarakat merasa lebih mudah memahami informasi yang diberikan dan tidak ragu untuk bertanya kepada petugas. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa pegawai memiliki kedisiplinan yang baik, aktif dalam memberikan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komitmen dan dedikasi aparatur telah mendukung keberhasilan pelaksanaan aktivasi IKD melalui pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Indikator insentif bagi pelaksana, hasil wawancara dengan Administrator Database, beliau menyampaikan bahwa "Untuk dorongan maupun dukungan secara langsung dalam bentuk hadiah atau sanksi khusus memang belum ada. Namun, secara nonformal kami sering mendapatkan nasihat dan motivasi dari pimpinan agar dapat bekerja dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Selain itu, apabila kami tidak menjalankan tugas dengan baik, pimpinan juga memberikan teguran sebagai bentuk pembinaan. Di sisi lain, pimpinan bersikap terbuka dengan menerima masukan dan saran dari para pegawai, sehingga tercipta komunikasi yang cukup baik dalam lingkungan kerja." menunjukkan bahwa belum terdapat insentif khusus dalam bentuk penghargaan maupun sanksi formal bagi pelaksana aktivasi IKD. Namun demikian, pimpinan secara rutin memberikan motivasi, arahan, dan teguran sebagai bentuk pembinaan kepada pegawai. Selain itu, hubungan komunikasi antara pimpinan dan pegawai berjalan cukup baik karena adanya keterbukaan dalam menerima masukan dan saran. Berdasarkan observasi yang dilakukan, kondisi tersebut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong pegawai untuk tetap menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab meskipun tanpa dukungan insentif material.

Indikator pengaturan birokrasi pelaksana, hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas yakni "Pegawai yang melaksanakan aktivasi IKD pada dasarnya sudah memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai, karena penugasan yang diberikan telah disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing pegawai. Selain itu, setiap pegawai juga dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap tugas yang diberikan, termasuk dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Kami juga telah memberikan pelatihan terkait aktivasi IKD kepada pegawai, sehingga seluruh pegawai pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menjadi operator dalam proses aktivasi IKD." menunjukkan bahwa penugasan pegawai dalam aktivasi IKD telah disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing pegawai. Selain itu, seluruh pegawai telah memperoleh pelatihan terkait aktivasi IKD sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai operator aktivasi IKD. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengisian jabatan struktural di Disdukcapil Kota Mataram telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai, yang terlihat dari pejabat struktural yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun dokumentasi struktur organisasi dan data kepegawaian memperkuat temuan bahwa pengaturan birokrasi telah berjalan sesuai prinsip kompetensi dan profesionalitas.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram telah mendukung pelaksanaan kebijakan. Komitmen dan dedikasi pegawai yang tinggi, dukungan moral dari pimpinan, serta pengaturan

birokrasi yang berbasis kompetensi menjadi faktor yang memperkuat implementasi aktivasi IKD. Meskipun belum terdapat insentif formal yang khusus diberikan kepada pelaksana, pelaksanaan aktivasi IKD tetap dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh sikap positif, tanggung jawab, dan kesiapan aparatur dalam menjalankan tugasnya.

3.4 Struktur Birokrasi

Dalam teori George C. Edwards III, kondisi ini tercermin melalui dua indikator utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP), hasil observasi menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Mataram telah memiliki SOP aktivasi IKD yang dituangkan dalam bentuk spanduk dan media informasi lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan. SOP tersebut menjadi acuan bagi petugas dalam menjalankan setiap tahapan aktivasi IKD agar berlangsung secara sistematis, seragam, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dokumentasi juga menunjukkan adanya media sosialisasi yang memuat informasi mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan aktivasi IKD. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat yaitu "Menurut saya cara penyampaian dan bahasa yang digunakan oleh petugas dukcapil sudah jelas dan dapat dipahami dengan baik. Contohnya saat melakukan sosialisasi sudah disediakan spanduk mulai dari pelayanan pembuatan KTP, akta kelahiran sampai informasi terkait IKD." hal ini menunjukkan bahwa bahasa dan cara penyampaian informasi oleh petugas mudah dipahami, serta didukung oleh keberadaan spanduk yang menjelaskan prosedur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal bagi petugas, tetapi juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan aktivasi IKD.

Indikator fragmentasi, hasil ditemukan bahwa Disdukcapil Kota Mataram menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, dan perguruan tinggi. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui sosialisasi bersama, kewajiban aktivasi IKD bagi pegawai OPD, serta pelaksanaan pelayanan jemput bola pada berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hasil dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pelayanan jemput bola memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai instansi dalam mendukung pelaksanaan aktivasi IKD. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antarunit kerja dan antarinstansi berjalan cukup baik sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi aktivasi IKD di Kota Mataram telah mendukung pelaksanaan kebijakan melalui keberadaan SOP yang jelas serta koordinasi lintas instansi yang efektif. Kejelasan prosedur pelayanan, pembagian tugas yang terarah, serta kerja sama antarorganisasi menjadi faktor yang memperkuat implementasi aktivasi IKD sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, sistematis, dan terintegrasi.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis setelah melakukan penelitian terkait dengan implementasi aktivasi IKD tepatnya di Disdukcapil Kota Mataram penulis memperoleh data penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD di Kota Mataram sebgai berikut:

Tabel 1.
Presentase Aktivasi IKD bagi Penduduk Wajib KTP-el di Kota Mataram

No	Kecamatan	Progres Rekam Dinamis	Target Pendaftaran IKD	Jumlah Aktivasi IKD	Presentase IKD
1	Ampenan	66.972	16.743	894	5,34%
2	Mataram	59.791	19.948	1064	7,12%
3	Cakranegara	52.777	13.194	532	4,03%
4	Sekarbela	44.475	11.119	769	6,92%
5	Selaparang	55.708	13.927	1267	9,10%
6	Sandubaya	51.414	12.854	511	3,98%
	Total	331.137	82.784	5.037	6,08%

Sumber: *Disdukcapil Kota Mataram, 2026*

Berdasarkan data aktivasi IKD di Kota Mataram yang baru mencapai 6,08% dari target pendaftaran (5.037 dari 82.784 jiwa), capaian ini masih jauh dari target nasional IKD sebesar 30%. Jika mengacu pada target tersebut, maka jumlah aktivasi yang seharusnya dicapai adalah sekitar 24.835 jiwa (30% dari 82.784). Jika dilihat per kecamatan, terdapat variasi capaian yang cukup signifikan, di mana Kecamatan Selaparang mencatat persentase tertinggi sebesar 9,10%, diikuti oleh Kecamatan Mataram 7,12% dan Sekarbela 6,92%, sementara Kecamatan Ampenan berada di tingkat menengah dengan 5,34%. Di sisi lain, Kecamatan Cakranegara 4,03% dan Sandubaya 3,98% menjadi wilayah dengan capaian terendah, yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program antar wilayah. Dengan demikian, Kota Mataram masih kekurangan sekitar 19.798 penduduk yang perlu melakukan aktivasi IKD untuk memenuhi target nasional tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara capaian aktual dan target yang ditetapkan, sehingga implementasi kebijakan IKD di Kota Mataram dapat dikategorikan belum optimal.

Penelitian ini memperkuat sebagian besar penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi IKD dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa rendahnya pemanfaatan IKD dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor yang turut memengaruhi rendahnya capaian aktivasi IKD di Kota Mataram. Oleh karena itu, selain meningkatkan sosialisasi, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi, perlu dilakukan perluasan pemanfaatan IKD dalam berbagai layanan publik agar masyarakat memperoleh manfaat nyata dari penggunaan IKD dan terdorong untuk melakukan aktivasi.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat aktivasi IKD di Kota Mataram dan Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hambatan tersebut. Faktor penghambat aktivasi IKD di Kota Mataram di antaranya ialah pemanfaatan IKD yang masih terbatas, keterbatasan anggaran untuk aktivasi IKD, ketrbatasan jaringan internet di Kota Mataram, keterbatasan pehamaman masyarakat tentang IKD, dan lemahnya regulasi IKD. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain pelayanan administrasi kependudukan sebagai syarat masyarakat melakukan aktivasi IKD, sosialisasi aktivasi IKD kepada instansi pemerintah dan masyarakat, dan pelayanan jempu bola aktivasi IKD.

IV. Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis terkait Implementasi Aktvasi Identitas Kependudukan Digital Bagi Penduduk Wajib KTP-el

DI Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat maka penelitian ini dapat disimpulkan Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Bagi Penduduk Wajib KTP-el DI Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan terdapat salah satu dimensi yakni sumber daya belum berjalan secara optimal, akan tetapi untuk dimensi yang lain seperti komunikasi, disposisi, dan struktur biroraksi telah berjalan secara optimal.

Keterbatasan Penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian mengenai Implementasi Aktivasi IKD bagi Penduduk Wajib KTP-el di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. (1) penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena implementasi aktivasi IKD berdasarkan perspektif informan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh daerah yang melaksanakan program IKD karena setiap daerah memiliki karakteristik, sumber daya, dan kondisi implementasi yang berbeda. (2) penelitian ini hanya berfokus pada implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el di Kota Mataram dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini belum mengkaji faktor-faktor lain di luar teori tersebut yang juga berpotensi memengaruhi keberhasilan implementasi IKD, seperti faktor sosial, budaya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital, maupun aspek keamanan data pribadi. (3) keterbatasan waktu penelitian menyebabkan proses pengumpulan data dilakukan dalam periode tertentu sehingga belum dapat menggambarkan perkembangan implementasi aktivasi IKD secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, data capaian aktivasi IKD yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang tersedia pada saat penelitian dilaksanakan sehingga dimungkinkan terjadi perubahan capaian aktivasi setelah penelitian selesai dilakukan. (4) penelitian ini masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat wajib KTP-el di Kota Mataram. Informasi yang diperoleh dari masyarakat berasal dari sejumlah informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya pandangan atau pengalaman lain yang belum terakomodasi dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan *(Future Work)*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el di Kota Mataram, terdapat beberapa peluang penelitian yang dapat dilakukan pada masa mendatang. (1) penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi IKD dengan menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda, seperti teori difusi inovasi, e-government, transformasi digital, atau penerimaan teknologi *(Technology Acceptance Model/TAM)* sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi IKD. (2) penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran *(mixed methods)* untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh berbagai faktor terhadap tingkat aktivasi IKD. Pendekatan tersebut dapat menghasilkan data yang lebih terukur mengenai hubungan antara sosialisasi, kualitas pelayanan, literasi digital, infrastruktur teknologi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD. (3) penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melakukan studi komparatif antara beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau daerah lain di Indonesia. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai praktik *terbaik (best* practice) dalam implementasi IKD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan capaian aktivasi IKD antar daerah. (4) penelitian selanjutnya dapat berfokus pada aspek pemanfaatan IKD setelah proses aktivasi dilakukan. Hal ini penting karena penelitian ini menemukan bahwa salah satu hambatan implementasi IKD adalah masih

terbatasnya pemanfaatan IKD dalam kehidupan sehari-hari dan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji tingkat penggunaan, manfaat, kepuasan pengguna, serta integrasi IKD dengan berbagai layanan pemerintah maupun nonpemerintah. (5) penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek keamanan data dan perlindungan privasi dalam penggunaan IKD. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan kependudukan, keamanan data pribadi menjadi isu penting yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan identitas digital. Dengan demikian, penelitian mengenai IKD masih memiliki ruang pengembangan yang luas baik dari sisi teori, metode, maupun objek penelitian. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam mendukung optimalisasi implementasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, para informan yang telah membantu dalam mengumpulkan data, serta dosen pembimbing Indramayu, S.H., M.H

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.

Ariesto, H. S. (2021). *Penelitian Kualitatif dengan NVIVO*. topazArt, art and technology.

Fika, fibriyanita, Deli, A., Normajatun, N., & Riska, A. (2026). *Toward Digital Population Administration: A Qualitative Analysis of the Implementation of Digital Identity Policies in the Transformation of Population Services*. *5* no *9*, 11264–11281.

https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i9.1418

Gatiningsih. (2018). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negir (IPDN.

Hutasoit. (2017). *Masalah Kependudukan di Indonesia: Konsep, Dinamika, dan Permasalahannya.* Institut Pemerintahan Dalam Negir (IPDN).

Karl, G., & Linus, H. (2023). *The insecurity of doing research and the 'so what question' in political science: how to develop more compelling research problems by facing anxiety*. *23*, 474–488.

Kupurunda, M., Yunus, M., Tang, M., & Abdullah. (2025). *Community E-Readiness in Adopting Technology: Evaluation of the Implementation of Digital Population Identity Application in Ternate City, Indonesia*. *XXVI S1*.

https://doi.org/10.70135/seejph.vi.3963

Labolo, M. (2016). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya.* PT RajaGrafindo Persada.

Medica, P., Husada, F., Ustiawaty, J., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).

Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.

Rahmah, F., Ishak, K., & Iis, M. (2026). *Effectiveness of Implementation of Digital Population Identity (IKD) Innovation in KTP-el Services at the Tasikmalaya City Population and Civil Registration Office*. *10(1)*, 15–28.

https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.15-28

Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Develovment.* Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Sugiyono, P. . (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susilawati, Kusworo, Mulyadi, & Gatiningsih. (2026). *A Policy Implementation Model for Population Administration Digitalization: Lessons from the Implementation of Digital Identity*. *3 No. 2*, 11–27.

https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i9.1418

Zainudin. (2025). *Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia*. *17 No. 1*.

https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.1-18

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956